

ABSTRAK

Negara menjadi aktor utama yang memiliki kewenangan dalam mengelola hutan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya negara membutuhkan kontribusi dari partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengelola hutan secara Bersama. Kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat telah dituangkan dalam berbagai peraturan terkait perhutanan sosial. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang pemberian izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu. Kebijakan Yang Diberikan Oleh Pemerintah tersebut masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat dan para petani, Program pelaksanaan, Program Pembiayaan capaian nya belum maksimal. Ada beberapa Kendala yang terjadi yaitu permasalahan tumpang-tindih lahan garapan, Kendala konflik internal, Kendala Pembiayaan, Kendala Monitoring dan Evaluasi dan Kendala Kewajiban Pemegang SK IPHPS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa Efektifkah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan mengetahui apa saja kendala yang terjadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tidak efektif karena kurangnya monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Izin, Perhutanan Sosial

ABSTRACT

The state is the main actor who has the authority to manage forests in Indonesia. In its implementation, the state requires the contribution of the active participation of the community to manage the forest together. Forest management policies that involve the community have been stated in various regulations related to social forestry. The government issued a policy in the form of a decree from the Minister of Environment and Forestry Number SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 regarding the granting of permits for the use of Social Forestry Forests in the working area of the State Forestry Public Company (Perum Perhutani) to the Joint Group United Telukjambe Independent Farmers. The policy given by the government is still not maximally felt by the community and farmers, the implementation program, the achievement of the financing program has not been maximized. There are several obstacles that occur, namely the problem of overlapping arable land, internal conflict constraints, financing constraints, monitoring and evaluation constraints and constraints on the obligations of the IPHPS SK Holders. The purpose of this study is to find out how effective the policies provided by the government are and find out what obstacles occur. The approach method used in this research is empirical juridical. In terms of data collection techniques, the authors use primary data obtained directly from respondents and secondary data, namely data obtained through literature study. The results of this study are that the implementation of the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 is not effective due to lack of monitoring and evaluation.

Keywords : Environment, Permit, Social Forestry.